

PERAN PUSA TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DI ACEH AWAL ABAD XX

Madhan Anis

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa

email: dhanis_1987@yahoo.com

Abstraksi

Organisasi keagamaan yang lahir di Aceh pada awal abad XX telah menyebabkan kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan. Dengan diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok baru atau golongan intelektual dalam masyarakat Aceh. Pendirian lembaga madrasah pertama di Aceh dimulai pada tahun 1916, diberi nama Madrasah Al Khairiyah yang berlokasi di Kutaraja. Selanjutnya pada tahun 1928 disusul oleh Madrasah Ahlussunah Wal Jama'ah Idi, pada tahun 1930 berdiri Madrasah Al-Muslim Peusangan, dan pada tahun 1939 terbentuklah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan gerakan-gerakan lain yang timbul di Aceh pada awal abad XX yang berpengaruh terhadap munculnya gerakan Nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda.

Kata Kunci: Pusa, Madrasah, Aceh

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1900, beberapa putera *uleebalang* diantaranya Teuku Chiek Muhammad Thayeb, Teuku Nyak Arief, Teuku Bentara H. Ibrahim, Teuku Chiek M. Johan Alamsyah dan lain-lain telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sekolah Belanda di Kutaraja (*Koloniaal Verslag 1900*). Selanjutnya sejak tahun 1901 dan tahun-tahun berikutnya hingga tahun dua puluhan, terdapat sejumlah putera *uleebalang* yang disekolahkan pada sekolah Belanda, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh (Alfian, 1987:27).

Dalam perkembangannya, pemuda-pemuda Aceh yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda seperti *Inlandsche School (Vervolg School)*, MULO, HIS dan juga dari

sekolah-sekolah agama yang modernis seperti madrasah yang sebagiannya menjadi tokoh-tokoh yang memelopori munculnya kesadaran nasionalisme di daerah Aceh. Di antara putera-putera *uleebalang* ini ada yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan bahkan juga ada yang tetap menjalin kerjasama dengan para pemimpin agama (ulama) dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Misalnya mereka yang menentang dirubahnya bahasa pengantar pada sekolah-sekolah rakyat (*volkschool*) dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada tahun 1931. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh dua tokoh *uleebalang* terkemuka yang pernah menjadi anggota *volksraad* mewakili daerah Aceh. Nama kedua *uleebalang* ini adalah Teuku Chiek Muhammad Thayeb

dan Teuku Nyak Arief (Depdikbud, 1984:43-44).

Berdasarkan pengalaman mereka selama dalam pendidikan, timbul keinginan untuk menghimpun diri dalam wadah tertentu (organisasi modern) diantaranya seperti *Vereeniging Atjeh* (Serikat Aceh), Serikat Islam (SI) dan Muhammadiyah. Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat mereka mencoba berjuang dengan cara-cara tidak lagi dengan menggunakan kekerasan (senjata), tetapi melalui organisasi-organisasi, baik yang khas Aceh maupun yang berasal dari luar Aceh.

Di tahun 1930-an, perang dengan Belanda baru mereda. Kondisi pendidikan Aceh waktu itu sudah porak poranda. Para ulama yang memimpin dayah dan madrasah telah lama bergabung dalam lasykar mujahidin melawan Belanda. Banyak di antara mereka gugur dalam *seuh prang* sebagai syuhada. Dayah banyak yang hancur, santrinya bergabung menjadi para pejuang bersama guru dan saudaranya di hutan hutan pedalaman Aceh. Dalam keadaan demikian, Tuanku Raja Keumala, yakni putra Tuanku Hasyim Banta Muda merintis satu madrasah yang sebelumnya berada di pelanggahan, dipindahkan ke belakang Mesjid Raya Baiturrahman yang didirikan pada tahun 1915 dengan nama Madrasah Al-Khairiyah (Depdikbud, 1984:57-58). Hal ini senada dengan pernyataan Taufik Abdullah (1983:22) :

Dengan suratnya tanggal 22 Oktober 1915, Tuanku Raja Keumala, meminta izin kepada Gubernur Militer dan Sipil Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan nama

Madrasah Khairiyah. Permintaan itu oleh Gubernur Swart dijawab dengan suratnya tanggal 6 Nopember 1915 No. 979/15, dimana menyatakan antara lain : kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di Kampung Keudah, diizinkan mendirikan sebuah madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda.

Selanjutnya berdiri beberapa madrasah seperti Madrasah Ahlussunah Wal-djama'ah di Idi pada tahun 1928 dibawah pimpinan Said Husin. Kemudian madrasah ini diubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam yang disingkat MADNI. Di Pidie, pelopor pendidikan agama adalah Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dengan dibantu oleh Teungku Abdullah Ujong Rimba, yang mendirikan Jamiatuddiniyah di Peukan Pidie, Sigli pada tahun 1929. Dua tahun kemudian dengan bantuan uleebalang Mukim II Pineung, T. Bentara H. Ibrahim, mendirikan pula Madrasah as-Saadah al-Abadiyah di Blang Paseh, Sigli. Di Aceh Utara dengan bantuan uleebalang Peusangan, Teuku Chik M. Johan Alamsyah, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (1900-1949) membangun perguruan Al-Muslim di Matang Glumpang Dua pada tahun 1929.

Selain itu, faktor lain yang mendorong berdirinya madrasah-madrasah diseluruh tanah Aceh adalah surat kabar Ummul Kura yang dikirim oleh Teungku Syekh Abdulhamid Samalanga dari Mekkah. Beliau adalah salah satu tokoh pemimpin Sarekat Islam (SI) di Aceh yang lolos dari penangkapan yang dilakukan Belanda tahun 1926 dan kemudian menetap di Mekkah.

Syekh Abdulhamid Samalanga mengirimkan surat kabat Ummul Kura tiap-tiap terbit kepada teman-temannya di tanah Aceh, antara lain kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan lainnya. Di celah-celah surat kabar Ummul Kura itu, antara baris-baris beritanya Syekh Abdulhamid Samalanga menulis berbagai pesan dan anjuran kepada teman-temannya di tanah Aceh juga dalam bahasa Arab. Diantara pesan-pesan yang penting yaitu masalah pembaharuan pendidikan Islam untuk mendapat kemerdekaan dan lainnya. Saran dan pesannya tersebut mendapat sambutan dari para ulama Aceh, dan akhirnya para ulama Aceh bergerak dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh memperbaharui Pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam, dengan merubah sistem pendidikan Dayah menjadi Madrasah yang berkelas, berbangku, berpapan tulis, dengan kurikulum yang modern, seperti yang telah diatur di Mesir dan negeri-negeri Islam lainnya (A. Hasjmi, 1976: 65-66). Maka setelah itu, berdirilah madrasah-madrasah di seluruh tanah Aceh, sejak Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, sampai pada Madrasah Aliyah.

Berikutnya lahirlah sebuah organisasi keagamaan yang memiliki ruang gerak yang lebih luas meliputi segala bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, sosial, keagamaan hingga bidang politik. Organisasi ini diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang lahir pada tahun 1939 berdasarkan hasil dari keputusan musyawarah Ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5 s/d 8 Mei 1939 (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo,

2007:153). Taufik Abdullah (1983:58) juga menyebutkan :

Sesudah persiapan dianggap cukup, maka Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap mengundang semua ulama yang dianggap patut dan mempunyai pengaruh di Aceh untuk menghadiri suatu musyawarah ulama yang akan dilangsungkan di Matangglumpang Dua, tepat pada hari perayaan Maulid Nabi, yaitu tanggal 12 Rabi'ul Auwal 1358H, bertepatan dengan 5 Mei 1939 M.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa organisasi keagamaan yang lahir di Aceh telah merubah warna baru bagi masyarakat Aceh, yaitu kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan. Organisasi PUSA memandang bahwa ilmu agama dan umum kedua-duanya sama-sama penting bagi kemajuan umat manusia. Kalau lembaga pendidikan dayah lemah dalam pengetahuan umum dan sekolah-sekolah umum lemah dalam pengetahuan Agama, maka PUSA memandang perlu penggabungan (*konvergensi*) kurikulum dayah yang mementingkan pendidikan agama dengan kurikulum sekolah-sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum. Kurikulum dan silabus madrasah-madrasah yang ada di Aceh waktu itu ternyata tidak memiliki keseragaman. Hal ini menurut PUSA akan menyulitkan bagi pelajar-pelajar yang ingin pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Sementara upaya penyeragaman kurikulum dan silabus madrasah yang ada di Aceh dimaksud terbentur pada tidak adanya tenaga-tenaga guru siap pakai. Maka didirikanlah *Normal Islam Institut* di Bireuen sebagai sekolah guru yang

bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, singkatnya agar kurikulum madrasah dapat diseragamkan (Rusdi Sufi, 2007: 155-156).

B. Munculnya Madrasah di Aceh

Awal Abad XX

a. Madrasah Al-Khairiyah

Mesjid Raya Banda Aceh

Lembaga pendidikan Hindia Belanda, berupa Sekolah Rakyat (SR) atau sekolah desa yang pertama di Aceh didirikan pada tanggal 30 Desember 1907 di Ulee Lheu Banda Aceh, sedangkan Pendidikan Agama yang disebut dengan Madrasah, untuk yang pertamakali didirikan di Banda Aceh (dulu Kutaraja) pada awal tahun 1916. Pembangunan sistem Madrasah, berarti bertambahnya lembaga pendidikan di Aceh, disamping Sekolah Rakyat (SR) dan Dayah. Dalam mendirikan sekolah-sekolah agama dimulai atas inisiatif salah seorang keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala seorang Ulama Bangsawan, meminta izin kepada Gubernur Militer/ Sipil Aceh H.N.A. Swart untuk mendirikan sebuah Madrasah di Kutaraja yang diberi nama Madrasah Al-Khairiyah. (Taufik Abdullah, 1983:22) hal senada dinyatakan Depdikbud (1984:58) yaitu :

Pembukaan lembaga ini atas inisiatif salah seorang keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala. Dengan suratnya yang bertanggal 22 Oktober 1915 ia meminta izin kepada Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-daerah Takluknya pada masa itu, yaitu H.N.A. Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kutaraja yang

diberi nama *Madrasah Al Khairiyah*.

Permohonan izin tersebut disetujui oleh Swart dengan beberapa ketentuan telah ditetapkan yang disampaikan melalui suratnya tertanggal 6 Nopember 1915, no. 979/15 dengan ketentuan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam stbl. Th. 1905, no. 550 (ordonansi guru tentang pengawasan pengajaran agama Islam). (Rusdi Sufi, 1998:43). Pada tahun 1916 dibukalah dengan resmi Madrasah Al-Khairiyah dengan mengambil tempat di halaman belakang Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja dengan pimpinan Madrasah yang pertama ditunjuk Teungku Muhammad Saman Tiro, seorang ulama yang sangat maju pikirannya dan lama belajar di Mekkah (Depdikbud, 1984:58). Dalam pernyataan senada, A. Hasjmy (1978:89) juga menyebutkan :

Secepat surat izin keluar, secepat itu pula Tuanku Raja Keumala mendirikan sebuah madrasah, yang lokasinya dalam pekarangan Masjid Jami' Baiturrahman Banda Aceh. Demikianlah, maka pada awal tahun 1916 madrasah dimaksud telah berdiri dengan diberi nama *Madrasah Khairiyah* dan sebagai Mudir (Direktur) madrasah diangkat Teungku Syekh Muhammad Saman, seorang ulama yang telah lama belajar di Mekkah.

Pemberian nama Madrasah Al-Akhairiyah sangat erat kaitannya dengan Perguruan Tinggi Islam yang pernah jaya di masa Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Jami'ah Baiturrahman yang sangat

terkenal di Asia Tenggara ketika pemerintahan Sultan Iskandar Muda. A. Hasjmy (1995:68) menyatakan bahwa :

Sesuai dengan suratnya kepada Pimpinan Komando Tertinggi Perang Gerilya, maka Tuwanku Raja Keumala memulai sendiri anjurannya itu. Dalam tahun 1916, beliau memelopori pembangunan Pusat Pendidikan Islam yang dinamakan “Jam’iyah Khairiyah”, berlokasi dalam Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh ; mungkin mengambil sempena dari “Jam’ah Baiturrahman” yang dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, merupakan Perguruan Tinggi Islam ternama di Asia Tenggara.

Pada awalnya keberadaan madrasah ini belum menunjukkan perubahan kurikulum yang berarti selain dari cara belajar yang telah menggunakan sistem klasikal, sedang mata pelajaran sama dengan yang diajarkan di Dayah (belum ada mata pelajaran umum). Tetapi sebagai langkah awal tentu sangat besar artinya bagi pertumbuhan pergerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam masa yang akan datang (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2007:98-99). Hal ini juga tergambar dalam pernyataan A. Hasjmy (1978:89) sebagai berikut :

Sekalipun pada mulanya mata pelajaran yang diajarkan pada Madrasah Khairiyah dan diadakan pengawasan yang ketat sekali, namun cita pembaharuan telah dapat dilaksanakan, sekalipun pada taraf pertama hanya pada bentuk ruang belajar dan cara mengajar, yaitu telah dipergunakan kelas madrasah tertentu dengan mempergunakan

bangku bagi murid-murid, papan tulis dan lain-lain alat sekolah. Dan setelah berjalan bertahun-tahun, mata pelajaranpun sudah ditambah lagi dengan sejarah, ilmu bumi, berhitung dan lain-lain.

Mulai tahun 1926 pada madrasah ini mulai diajarkan mata pelajaran umum, seperti sejarah, Ilmu Bumi, Berhitung dan lain-lain. Pada tahun itu pula terjadi perobahan dan perkembangan besar dalam masyarakat, sehingga di Seulimum Aceh Besar didirikan pula Madrasah Perguruan Islam yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab, semacam Madrasah Al-Khairiyah tersebut. Depdikbud (1984:59) menyatakan bahwa :

Pengaruh modernisme Islam di Aceh mulai jelas kelihatan pada tahun 1926. Dalam tahun itu selain terjadi perubahan dan perkembangan pada Madrasah Al-Khairiyah seperti tersebut diatas, juga di Seulimun (Aceh Besar) mulai pula didirikan sebuah lembaga agama, yaitu *Madrasah Perguruan Islam* yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Madrasah Al-Khairiyah adalah pelopor pembaharuan sistem Pendidikan Islam di Aceh, dan Tuanku Raja Keumala adalah otak dan jiwanya dari pembaharuan. Suatu hal yang amat menarik bahwa Tuanku Raja Keumala tidak mau menerima subsidi dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghidupkan Madrasahnyanya itu. Beliau ingin membangun Madrasah Khairiyah itu dengan kekuatan ummat Islam sendiri (A. Hasjmy, 1978:90).

b. Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Idi

Para lulusan madrasah yang masih setingkat ibtidaiyah (dasar) meneruskan pelajaran mereka ke luar Aceh, di antaranya Ali Hasjmy, Sayid Abubakar, A. Jalil Amin, M. Abduhsyam memilih Sumatera Barat. Amir Husin al-Mujahid memilih Tanjung Pura, M. Hasbi Ash-Shidieqie dan Cek Mat Rahmany berangkat ke pulau Jawa, sedangkan M. Nur el-Ibrahimi dan Usman Raliby menuju Mesir, dan A. Wahab Dahlawi melanjutkan pelajaran ke India. Pada tahun yang hampir bersamaan dengan didirikan Al-Irsyad di Lhokseumawe, maka di Idi dalam kabupaten Aceh Timur, didirikan sebuah Madrasah yang bernama Ahlussunnah Wal Jamaah yang dipimpin oleh Said Husein. Madrasah ini sebenarnya didirikan dalam rangka membendung gerakan Muhammadiyah di Aceh Timur yang sudah melebarkan sayapnya, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rusdi Sufi (1998:42) yang menyebutkan :

Perlu juga dikemukakan sebagai akibat didirikan Muhammadiyah di Aceh Timur timbul reaksi dari pemimpin-pemimpin keagamaan di sana yang tidak menyetujui cara-cara yang dibawakan oleh Muhammadiyah. Mereka ini mendirikan organisasi tandingan, Siraju'ddin atau Pelita Agama di Langsa dan *Ahlussunnah Wal Jamaah* di Idi. Organisasi yang disebut terakhir beranggota pada waktu didirikan sebanyak 160 orang dan didukung oleh *Uleebalang* setempat, karena itu cabang Muhammadiyah tidak dapat didirikan disana. Kedua organisasi ini juga bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah

atau Madrasah Islam. Misalnya di Idi berdiri MADNI (Madrasah Nahlatul Islam) di bawah pimpinan Said Husein.

c. Madrasah Al-Muslim Peusangan

Pendirian Almuslim Peusangan dilakukan dalam situasi peperangan antara putra-putra Aceh dengan serdadu-serdadu Belanda untuk mewujudkan perjuangan membela Kemerdekaan yang dikepalai oleh Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap. Selama dalam pertarungan yang berlarut-larut ini, mereka melihat, merasa dan menyadari optimisme yang semakin menciut untuk menggondol suatu kemenangan, disebabkan oleh berubahnya situasi dan kondisi yang pada gilirannya membawa kepada taktik dan strategi yang hanya dimanfaatkan oleh pihak lawan. Karena pihak lawan bertarung jauh di luar tanah airnya, sehingga di negerinya mereka dapat berpikir dengan tenang sambil mengkonsolidir diri mereka dengan mengadakan sumber-sumber kekuatan baru, baik ilmu-ilmu pengetahuan ataupun hasil-hasil produknya untuk diterjunkan ke medan perang. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi para pejuang Aceh dimana saat itu mereka berfikir dan menyiapkan berbagai strategi dalam kondisi sambil berperang. Sebagai akibatnya segalanya menjadi terbelengkalai baik segi; perekonomian, kehidupan bernegara, termasuk dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Dalam situasi yang demikian Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap dan kawan-kawan berkesimpulan bahwa semua itu disebabkan oleh kebodohan, oleh karena itu mereka mencari jalan lain

yaitu membangun dan menyalakan pelita di tengah kegelapan malam, untuk menerangkan jalan yang akan mereka tempuh ke arah yang memberi jawaban terhadap tantangan ini dengan mendirikan Pendidikan atau Yayasan Almuslim Peusangan dengan Kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan pada masa itu dengan sistem terpadu dan menyeluruh, yakni suatu Kurikulum yang komprehensif, sehingga lulusannya pada saat itu menjadi ahli-ahli di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. (umuslim.ac.id, diakses tanggal 15 Maret 2015). Selanjutnya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo (2008:75) menyebutkan :

Ada beberapa sebab yang mendorong Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap berhasrat merubah sistem pendidikan dari bentuk Dayah ke bentuk pendidikan madrasah atau sekolah. Di antaranya adalah saran dari ulama-ulama yang datang berdiskusi dengannya, terutama Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dan Ayah Hamid Samalanga serta anjuran-anjuran dari guru-guru sekolah umum (*volkschool*.)

Akhirnya dengan bantuan uleebalang Peusangan, Teuku Chik M. Johan Alamsyah, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (1900-1949) membangun perguruan Al-Muslim di Matang Glumpang Dua pada tahun 1929. Ulama itu bersama dengan Teungku Syaikh Ibrahim berkunjung ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri perkembangan sekolah-sekolah agama di sana. Pada tanggal 14 November 1929 bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1448 H di Matang Glumpang Dua Peusangan Aceh Utara, didirikan sebuah

organisasi yang dinamakan *Al Muslim*. Diketahui oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan lembaga-lembaga sekolah sebanyak mungkin dalam bentuk Madrasah-madrasah dalam rangka modernisasi atau pembaharuan sistem pendidikan agama di wilayah peusangan dan kabupaten Aceh Utara pada umumnya (Taufik Abdullah, 1983: 27). Depdikbud (1984:59) juga menyebutkan :

Pada tanggal 21 Jumadil – Akhir 1348 Hijriah, bertepatan dengan 14 Nopember 1929 di Matang Glumpang Dua (Aceh Utara) berdiri sebuah organisasi yang dinamakan *Al-Muslim*. Ketua organisasi ini ialah dijabat oleh salah seorang ulama terkenal di daerah itu, yaitu Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap, yang ikut dibantu oleh Uleebalang setempat T. Chiek Peusangan.

Pada tanggal 13 April 1930 diresmikanlah berdirinya Madrasah Al Muslim di Peusangan. Madrasah ini dalam melakukan perubahan dari sistem tradisional ke dalam sistem Madrasah sesuai dengan perubahan zaman (modernisasi), telah memasukkan dan mengembangkan dalam kurikulumnya beberapa mata pelajaran yang bersifat umum meskipun dalam bahasa Arab sebagaimana pelajaran agama yang telah menjadi pelajaran utama pada madrasah tersebut. Mata pelajaran umum diberi nama dalam bahasa Arab, seperti berhitung disebut ilmu Hisab, kesehatan disebut ilmu Shihhah, ilmu bumi disebut ilmu jugrafi, ilmu jiwa dengan ilmu an nafs, logika disebut ilmu manthiq, olah raga disebut ilmu ar-riyadhah dan

sebagainya. Rusdi Sufi (1998:43-44) menyatakan bahwa :

Karena dorongan ini pula Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap bersama T.H. Chiek Muhammad Johan Alamsyah, *Uleebalang* Peusangan (Aceh Utara) pada tanggal 14 Nopember 1929 telah mendirikan organisasi *Al-Muslim* di Matang Glumpang Dua. Organisasi ini pada tanggal 13 April 1930 berhasil membangun Madrasah *Al-Muslim* pertama di kota itu dengan kurikulumnya ditambah dengan mata pelajaran umum, Madrasah ini juga mendirikan organisasi kepanduannya yang diberi nama *Kasshafatul Muslim* (KAMUS).

Melihat pesatnya maju Madrasah Al-Muslim, sehingga para pelajarnya tidak hanya datang dari Aceh Utara saja, maka semangat pengurus Al-Muslim semakin bertambah dan diputuskanlah untuk segera dibangun gedung permanen sedangkan lokasinya ditetapkan didekat Teungku Di Glee, jalan ke Uteuen Gathom, atas tanah yang di wakafkan oleh Ampon Chik khusus untuk mendirikan Madrasah Al-Muslim. Untuk mencari bentuk yang baik dari gedung yang akan di bangun itu, diputuskan untuk mengirimkan satu tim ke Sumatera Barat guna membanding-bandingkan antara gedung-gedung yang sudah ada disana. Tim tersebut terdiri dari tiga orang, yaitu Teungku. Abdurraman Meunasah Meucap sendiri sebagai ketua, Teungku Umar Gampong Raya sebagai tenaga ahli dan yang akan melaksanakan pembangunannya dan Haji Mustafa Salim, pimpinan Madrasah “Islamiyah” Bireuen yang berasal dari Sumatera Barat, sebagai penunjuk jalan. Pada suatu hari yang telah ditentukan, dengan

diantar oleh para pengajar dan para pelajar Al-Muslim tim tersebut berangkat dari Matangglumpangdua, dengan menumpang kereta api menuju Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk selanjutnya naik kapal laut dari Ulee Lheue menuju Emma Haven (Teluk Bayur) sekarang di Padang (Hasbi Amiruddin, 2003:35) Pernyataan ini diperkuat oleh Depdikbud (1984:60) sebagai berikut :

Oleh karena Madrasah Al-Muslim belum memiliki suatu gedung pusat yang permanen, maka dalam rangka pendirian gedung tersebut dan memilih yang menarik, pengurus lembaga itu telah mengutus dua orang peninjau ke Sumatera Barat guna melihat bagaimana bentuk gedung-gedung madrasah yang sudah lebih dahulu terdapat disana.

Sepulang tim tersebut dari Sumatera Barat, diadakan rapat dan ditentukan gambar yang dipilih. Sesuai dengan hasil rapat tersebut, maka pada tanggal 10 Muharram 1350 H bertepatan dengan tanggal 28 Mei 1931, diluncurkan acara peletakan batu pertama gedung Madrasah Al-Muslim yang permanen di jalan Teungku Abdurraman sekarang, oleh Pocut Ramlah, putri tertua dari Ampon Chik Peusangan, sedang pelaksanaan pembangunannya adalah Teungku Umar Gampong Raya (Hasbi Amiruddin, 2003:35).

Melihat sepak terjang Madrasah Al-Muslim yang banyak memiliki cabang diberbagai tempat di Aceh terlebih lulusan-lulusan madrasah tersebut kemudian aktif dalam berbagai bidang kemasyarakatan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan di Aceh.

Maka Madrasah Al-Muslim ini dapat disebutkan sebagai salah sebuah madrasah yang ternama di Aceh (Depdikbud, 1984:60). Selanjutnya Rusdi Sufi (1998:57) juga menyebutkan sebagai berikut :

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pesatnya perkembangan Madrasah-madrasah Islam itu, dapat dilihat, umpamanya pada Madrasah Al-Muslim yang berpusat di Matang Glumpang Dua. Dalam waktu cepat madrasah ini telah berhasil mendirikan cabang-cabangnya hampir di seluruh *mukim* dalam wilayah *Lanschaap* Peusangan, seperti di Cot Meurak Bireun, Cot Batee, Bale Seutui, Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteuen Gathom, Lueng Daneun Leubu dan lain-lain.

d. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

Gagasan-gagasan atau ide untuk melakukan pembaharuan diawali dengan sepucuk surat yang dikirim Syekh Abdul Hamid Samalanga dari Mekkah kepada Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap yang isi suratnya seputar informasi kemajuan Ikhawunul Muslimin di Mesir dan ajakan memajukan pendidikan di Aceh. Sehingga pada suatu hari Tgk. Abdurrahman suatu hari menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Blang Jruen Aceh Utara yang disambut oleh Tgk. Ismail Ya'kub. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai ide untuk mendirikan sebuah organisasi ulama sebagai wadah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Aceh serta dapat mempersatukan pengurusan madrasah-madrasah yang ada diseluruh Aceh.

Sepulang dari Blang Jruen, Teungku Abdurrahman menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Teungku Ismail Yakub kepada kawan-kawan dan pengikutnya di Matang Glumpang Dua, terdapat diantaranya adalah Tgk. Usman Azis (alumnus Thawalib Padang) yang juga merupakan seorang guru Madrasah Al-Muslim Peusangan. Setelah mendengarkan hasil pembicaraan tersebut, mereka sepakat menyebarkan ide pembentukan organisasi Ulama tersebut ke seluruh daerah di Aceh. Penyampaian ide tersebut diterima baik oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh. Setelah penyebaran berita mengenai pembentukan organisasi ulama telah dilakukan, Tgk. Abdurrahman mengundang Ulama yang terkemuka di Aceh untuk menghadiri musyawarah antar Ulama yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1939 di Matang Glumpang Dua sekaligus ditetapkan secara resmi lahirnya PUSA.

Sebuah organisasi kedaerahan yang bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) didirikan di Aceh, sebagai hasil keputusan musyawarah ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5-8 Mei 1939 di kampus Madrasah Almuslim Peusangan, Matang Glumpang Dua, Bireun. Rusdi Sufi (2009:107) menyatakan bahwa :

Selain itu, berdiri pula sebuah organisasi yang diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), hasil dari keputusan ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5-8 Mei 1939, bertepatan dengan hari peringatan lahirnya (maulid) Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H, di Kampus Madrasah Almuslim Peusangan, Matang Glumpang Dua

(Onderafdeeling Bireun, Aceh Utara).

Organisasi ini dalam waktu yang relatif singkat sudah meluas ke seluruh Aceh dan menjadi milik masyarakat. Adapun maksud dan tujuan gerakan PUSA adalah : Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar agama Islam, menyatukan paham pada penerangan hukum, memperbaiki dan menyatukan leerplan pelajaran agama di sekolah-sekolah agama, dan mengusahakan untuk mendirikan perguruan Islam dan mendidik pemuda-pemuda serta putra-putri Islam dalam keagamaan. Pernyataan senada diungkapkan oleh A. Hasjmy (1995:73) yaitu:

Para Ulama Pemimpin PUSA pada umumnya mempunyai dayah-dayahnya sendiri, yang setelah pelaksanaan pembaharuan Sistem Pendidikan Islam dirobah namanya menjadi "Madrasah....." dengan bermacam-macam nama. Inilah yang menyebabkan kemudian mendapat dukungan sangat luas dari masyarakat Aceh.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun kehadiran Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) sedikit terlambat dibanding organisasi keagamaan lainnya di Aceh, namun kehadirannya semakin memperkuat pembaharuan sistem pendidikan agama di Aceh yang ditandai dengan semakin menjamurnya madrasah-madrasah yang diprakarsai oleh PUSA yang nyaris berdiri diseluruh wilayah Aceh.

C. Peran PUSA Terhadap Lembaga Pendidikan Madrasah di Aceh Awal Abad XX

Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, Aceh merupakan salah satu daerah yang terlambat menerima pendidikan barat dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan oleh perlawanan berkepanjangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga pendidikan ini baru diperkenalkan kepada rakyat Aceh pada awal abad ke XX.

Menurut Alfian dalam (Rusdi Sufi,2009:94) dengan diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Dengan demikian, kehadiran kelompok baru tersebut dianggap sebagai suatu ancaman baru dan tantangan bagi mereka, yaitu kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tradisional. Untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang disebut terakhir berusaha untuk meningkatkan diri, terutama memodernisir lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki.

Tetapi berbeda dengan apa yang menjadi maksud dan harapan pemerintah kolonial Belanda, karena tidak semua dari mereka yang pernah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah itu, berhasil dirangkul oleh pemerintah kolonial. Ada diantara putera-putera Uleebalang Aceh yang telah mengenyam pendidikan ini, mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh yang mempelopori munculnya kesadaran nasional di Aceh dan bahkan juga terdapat diantara mereka yang tetap bekerjasama dengan para pemimpin agama (Depdikbud, 1984:38).

Berdasarkan pengalaman mereka selama pendidikan, terutama yang dilihat atau dialami sendiri diluar daerah Aceh, timbul keinginan untuk menghimpun diri dalam wadah tertentu (organisasi modern). Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, mereka berusaha berjuang dengan tidak lagi menggunakan kekerasan (senjata), tetapi melalui organisasi-organisasi baik yang khas Aceh (organisasi keagamaan) maupun yang berasal dari luar Aceh. Organisasi-organisasi tersebut kemudian banyak berkiprah dalam memajukan pendidikan di Aceh hingga pertengahan abad ke 20. Adapun organisasi-keagamaan keagamaan tersebut antara lain “*Madrasah Al-Khairiyah Masjid Raya Banda Aceh*”, didirikan oleh seorang Ulama Bangsawan keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala pada tahun 1916; “*Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Idi*”, yang didirikan oleh Syed Husein pada tahun 1928 di Idi; “*Madrasah Al-Muslim Peusangan*”, yang didirikan oleh Tgk. Abd al- Rahman pada tahun 1930; dan “*Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*”, yang diprakarsai oleh Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap dan Tgk. Ismail Yakub tahun 1939.

Selanjutnya pada tahun 1930-an, lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat. Sehingga periode ini dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah agama di Aceh (Depdikbud, 1989:48). Kemunculan Organisasi PUSA telah membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Aceh, hal ini dikarenakan pada awal berdirinya madrasah-madrasah semuanya bergerak sendiri-sendiri. A. Hasjmy (1976:67) menyebut bahwa pada mulanya, madrasah-madrasah ini berdiri

sendiri-sendiri; dan kemudian setelah lahir organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebahagian besar dari madrasah-madrasah itu dikoordinir oleh PUSA, antara lain dengan menyeragamkan kurikulumnya. Hal ini mudah terjadi karena sebahagian besar Ulama-ulama yang membangun dan memimpin madrasah-madrasah itu, setelah PUSA terbentuk menjadi pemimpin PUSA pula.

Salah satu agenda utama program kerja PUSA adalah pembentukan sebuah *Perguruan Normal Islam Institut (NII)* yang berfungsi untuk menampung lulusan berbagai Madrasah Ibtidaiyah waktu itu dan sekaligus untuk mensuplai guru-guru bagi Madrasah tersebut. Rusdi Sufi (2009:109) menyebutkan juga bahwa:

Untuk mencapai tujuannya, sebagai langkah pertama, didirikan sebuah sekolah guru yang bernama Normal Islam Institut Bireun, dibuka pada tanggal 27 Desember 1939. Sebagai pimpinannya ditunjuk M. Nur El Ibrahimy, lulusan Al Azhar Universiti dan Darul Ulum Mesir, sedang wakilnya ialah Teuku Muhammad, mantan Siswa R.H.S. (Rechts Hoge School) di Jakarta. Jumlah siswa tahun pertama sebanyak 57 orang, terdiri dari 55 putera Aceh, seorang putera Minangkabau dan seorang dari Palembang.

Kurikulum Perguruan Normal Islam itu hampir mirip seperti Normal Islam yang ada di Padang dan berlangsung selama 4 tahun. Disamping kegiatan kurikuler, para peserta dilibatkan dalam kegiatan ekstra kurikuler yaitu kepanduan, kasyaffatul Islam dan organisasi pelajar HIMPIA

(Himpunan Pelajar Islam Aceh) yang dipimpin oleh Hasan Muhammad Tiro. Dalam merealisasikan kegiatan itu, Perguruan Normal Islam tidak hanya mempekerjakan guru-guru tamatan madrasah di luar Aceh seperti Ismail Yacub, melainkan mereka juga yang berasal dari sekolah umum seperti T. Muhammad, pernah sekolah *Rechtoogeshool* di Jakarta dan R. Murdani serta A. Gani Usman, guru Taman Siswa Bireun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Perguruan Normal Islam benar-benar menjadi sekolah terpadang pada zamannya. Kualitas mereka selain mampu berbahasa Arab, juga dapat menguasai Bahasa Belanda, Inggris dan Prancis. Ini terlihat dalam pernyataan Depdikbud (1984:66) yang menyebutkan :

Untuk sistem pengajarannya dipedomani dari yang diberikan pada Normal Islam PGRI (Padang, Sumatra Barat) dan lama masa belajarnya juga disamakan, yaitu 4 tahun. Perlu dicatat disini bahwa tenaga pengajar teras di sekolah ini adalah Teungku M. Nur El Ibrahimy, tamatan Al – Azhar Cairo, yang bertindak sebagai direktur dan guru dalam ilmu-ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pendidikan; serta Mr. Muhammad, tamatan Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta, yang mengajar mata pelajaran umum, bahasa Belanda dan bahasa Inggris.

Sebagian dari alumni lembaga pendidikan Normal Islam Institut menjadi tenaga-tenaga pengajar pada madrasah-madrasah dan sebagian lagi menjadi pejabat-pejabat pemerintahan pada masa awal kemerdekaan untuk mengisi dan mengendalikan pemerintahan di Aceh.

Karena itu Lembaga Normal Islam Institut Bireun ini amat masyhur dalam masyarakat. Dalam perkembangan perubahan sistem pendidikan terutama lembaga-lembaga pendidikan Madrasah di Aceh, organisasi PUSA dalam kongres pertamanya di Sigli tahun 1939 telah mampu menyepakati untuk mempersatukan kurikulum-kurikulum sekolah Agama di Seluruh Aceh. Meskipun pada saat itu nama-nama lembaga madrasah atau sekolah berbeda-beda sesuai dengan selera pembangunan dan pengurusnya. Semuanya diseragamkan kurikulumnya dengan masa tahun ajarannya 4 tahun (Depdikbud, 1984:66).

PUSA lahir dalam situasi masyarakat Aceh yang sebagian besar Ulama dan pengikutnya berpandangan sempit dan kolot dalam memahami Islam. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berasal dari negeri Barat seperti bahasa Inggris, dipandang tabu oleh masyarakat bahkan sebagian besar Ulama mengharamkannya karena beranggapan bahwa bahasa Inggris tidak termasuk dalam lingkungan ilmu dan kebudayaan Islam. Disamping itu juga di Aceh timbulnya berbagai *khilafiat* (antagonisme), *bid'ah* dan *khurafat* yang telah lama ditabur oleh kaum penjajah. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di Aceh, beberapa ulama bersepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang murni dan suci sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membasmi berbagai *khilafiat*, *bid'ah*, dan *khurafat* diantara pendapat-pendapat ulama. Selain itu PUSA juga ingin menyeragamkan sistem pendidikan dan mata pelajaran (*leerplan*) di sekolah-sekolah Islam yang

banyak didirikan di Aceh pada masa itu (Hasbi Amiruddin, 2003:36).

Tiga bulan setelah PUSA didirikan, Pengurus Besar PUSA mengadakan rapat untuk membicarakan usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Rapat ini menghasilkan empat keputusan yaitu rencana untuk membuka *Normal Islam Institute* (NII) di Bireuen dalam waktu dekat, menetapkan Teungku M. Nur El Ibrahimy menjadi Direktur, mengangkat T.M. Amin menjadi Sekretaris I Pengurus Besar PUSA, dan yang terakhir mengangkat Teungku Mustafa Ali menjadi Bendahara PUSA (Rusdi Sufi, 1998:83)

Salah satu tujuan pendirian PUSA adalah mengembangkan pendidikan Islam yang ada di Aceh dan menyeragamkan *leerplan* (rencana pelajaran) madrasah-madrasah yang ada di Aceh. Usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam di Aceh salah satunya dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam baru yakni NII (*Normal Islam Institut*) di Bireuen sekitar tanggal 27 Desember 1939, dan memasukkan mata pelajaran umum (*aqliyah*) dalam kurikulum madrasah sebagai upaya pembaharuan pendidikan Islam di Aceh. Pada tahun 1930-an beberapa ulama-ulama dayah dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan khususnya ide-ide tentang sistem pendidikan. Ini dapat dilihat dari keputusan mereka untuk mengambil dari nama Dayah ke Madrasah. Beberapa madrasah yang dibangun waktu itu diharapkan dapat mengatur kurikulum dan metode mengajar untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat khususnya dalam merespon ilmu pengetahuan modern (Hasbi Amiruddin, 2008:50). Ketika itu masyarakat

membenci pengetahuan yang disampaikan dengan menggunakan huruf latin. Karena itu strategi yang dilakukan PUSA ialah dengan memberi nama setiap mata pelajaran umum dengan bahasa Arab, memakai bahasa arab serta diajarkan dengan bahasa Arab.

Hal ini sesuai dengan asumsi masyarakat ketika itu yang memandang bahwa setiap pengetahuan yang memakai bahasa Arab adalah pelajaran agama Islam. Sebaliknya semua pengetahuan yang berbahasa latin adalah berbau ke-Belanda-an, dan karena itu mereka tentang bahkan mereka dipelajarinya hanya dengan alasan untuk membangkitkan semangat rakyat dan pemuda untuk melawan kolonialis Belanda (Abd. Mukti, 2006:138)

Organisasi PUSA memandang bahwa ilmu agama dan umum keduanya sama-sama penting bagi kemajuan umat manusia. Kalau lembaga pendidikan dayah lemah dalam pengetahuan umum dan sekolah-sekolah umum lemah dalam pengetahuan Agama, maka PUSA memandang perlu penggabungan (*konvergensi*) kurikulum dayah yang mementingkan pendidikan agama dengan kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum. Kurikulum dan silabus madrasah-madrasah yang ada di Aceh waktu itu ternyata tidak memiliki keseragaman. Hal ini menurut PUSA akan menyulitkan bagi pelajar-pelajar yang ingin pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Sementara upaya penyeragaman kurikulum dan silabus madrasah yang ada di Aceh dimaksud terbentur pada tidak adanya tenaga-tenaga guru siap pakai. Maka didirikanlah *Normal Islam Institut* di Bireuen sebagai sekolah guru

yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, singkatnya agar kurikulum madrasah dapat diseragamkan (Rusdi Sufi, 2007: 155-156).

Pembaharuan pendidikan lainnya yang dijalankan PUSA ialah memasukkan nama mata pelajaran Agama (*naqliyah*) dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Untuk melaksanakan program ini mereka mendirikan dua unit Sekolah Menengah Pertama, yakni satu unit sekolah di Bireuen, dan satu unit di Idi, Aceh Timur serta Satu unit Sekolah Guru Atas (SGA) di Kutaraja. Ketiga sekolah ini didirikan tahun 1952 (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990:73).

Selama perjalanannya, Normal Islam Institut (NII) telah banyak memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh terutama dalam membuka pikiran kolot yang umumnya masih dimiliki masyarakat Aceh. Contoh nyatanya adalah dengan diajarkannya pelajaran Bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam kurikulum *Normal Islam Institut*. Kemampuan berbahasa Inggris tentunya menambah khasanah Bahasa bagi pelajar-pelajar *Normal Islam Institut* walaupun kebanyakan para Ulama menganggapnya haram karena merupakan produk bangsa Barat. Akan tetapi lama-kelamaan karena kemampuan berbahasa Inggris tersebut digunakan untuk kemajuan rakyat Aceh, akhirnya pelajaran bahasa Inggris dapat diterima (Depdikbud, 1989:49).

Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh PUSA dalam hal penyeragaman kurikulum ini didukung penuh oleh masyarakat dan madrasah-madrasah yang lebih dulu berdiri. Lembaga-lembaga pendidikan pada

waktu itu yang ikut serta menyeragamkan kurikulum antara lain:

- Madrasah Almuslim yang didirikan tahun tanggal 24 November 1929 oleh Teungku Abdurrahman Mns. Meucap dan telah memiliki gedung permanen. Madrasah ini banyak mendirikan cabang-cabangnya yang tersebar seluruh *Onder Afdeeling* (kewedanan) Bireuen (Shabri A, dkk, 2003:35)
- Madrasah Sa'adah Abdiah tahun 1931 di Sigli, Pidie didirikan oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh.
- Tgk Abdul Wahab Keunaloe Seulimum mendirikan *Madrasah Najdilah* tahun 1926 yang kemudian berganti nama perguruan Islam dan memiliki dua tingkat yakni tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Bersamaan dengan pembaharuan sistem pendidikan, juga dibangun gedung-gedung tempat belajar serta tenaga pengajarnya antara lain Tgk. Muhammad Ibrahim Ali, Ali Hasjmy, Said Abu Bakar dan Ahmad abdullah (Alumni Thawalib Parabek, Perguruan Thawalib Padang panjang dan Normal Islam Padang).

Selama berkiprah di Aceh, PUSA terus berkembang dan sejumlah lembaga pendidikan telah didirikan oleh para anggotanya termasuk *Normal Islam Institut* yang mampu merubah pola pikir dan pola kehidupan bangsa dari yang kuno menjadi modern. Bahkan lebih dari itu para anggota PUSA sempat menguasai hampir seluruh lini pemerintahan di Aceh sehingga sempat terkenal dengan istilah pemerintahan PUSA di Aceh (M. Yunus Djamil, 2009:181). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dunia pendidikan di Aceh kembali mengalami pasang

surut, dan PUSA tetap tampil optimis semua tantangan yang ada.

Tujuan pendirian PUSA tampak tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi dalam kenyataannya muncul juga gerakan politik semenjak konggres pertama tahun 1940. Benih-benih permusuhan terhadap Belanda ditanamkan, terutama kepada pemuda melalui organisasi kepanduan yaitu Kasyfatul Islam, sehingga kelak gerakan ini menjadikan dirinya sebagai gerakan anti pemerintah Belanda yang cukup membahayakan. (Rusdi Sufi, 2009:109)

Selanjutnya M. Isa Sulaiman dalam makalahnya Madrasah dan pembentukan Elite Modernis yang dirangkum dalam Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara PKA-3 (1988:488) menyatakan bahwa :

Di lain pihak, kita menyaksikan pula lahir dan tumbuhnya elite baru yang ditempa oleh madrasah – dan secara kebetulan sebelum masa kemerdekaan umumnya berafiliasi pada pusa (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), menggantikan elite lama dalam berbagai posisi penting baik kehidupan sosial, politik, ekonomi dan malah militer.

Kiprah PUSA sebagai organisasi lokal terus berkembang dan menjadi sebuah “kekuatan” baru di Aceh disamping itu juga mereka (PUSA) terus membenah diri dengan membentuk badan-badan (lembaga-lembaga) yang bernaung dibawahnya, yaitu Pemuda PUSA diketuai oleh Teungku Amir Husein Al Mujahid, Muslimat PUSA dengan ketuanya Teungku Nya’ Asma (isteri Tgk. Muhammad Daud Beureueh) dan *Kasyafatul Islam* atau kepanduan Islam (KI) yang dikomandani oleh Teuku

Muhammad. Kekuatan PUSA semakin kuat dengan menggabungkan diri dengan Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) tahun 1941. MIAI merupakan suatu wadah organisasi Islam yang didirikan di Surabaya tahun 1937 sebagai hasil dari keputusan rapat gabungan antara berbagai organisasi Islam Indonesia, yaitu: PSII, Muhammadiyah, Al-Islam, POI, Al-Irsyad, Hidayatul Islam Banyuwangi, Khairiyah Surabaya, PERSIS dan PAI. PUSA sendiri tercatat sebagai anggota MIAI yang ke-11, dari total 27 organisasi Islam yang menggabungkan diri ke dalamnya di tahun 1941. Rusdi Sufi (1998:86) menyebutkan sebagai berikut :

Sementara ini bagian penyiaran dan penerbitan berhasil pula menerbitkan majalah “Penyoeloh” di bawah pimpinan Tgk. Ismail Yakob. Majalah ini diterbitkan di Bireun dan dicetak di Medan. Dan untuk lebih mensejajarkan geraknya dengan organisasi-organisasi Islam di luar daerah pada akhir tahun 1940 PUSA juga telah menjadi anggota M.I.A.I. (Majlis Islam A’la Indonesia).

Kalau diperhatikan dari apa yang tertulis itu tujuan dan maksud didirikan, tampaknya PUSA tidak bergerak dalam bidang politik. Kelihatan bahwa pada mulanya tujuan organisasi ini dibentuk antara lain untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempersatukan syiar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh. Berusaha sedapat mungkin mempersatukan paham ulama-ulama Aceh dalam menerangkan hukum-hukum dan berusaha memperbaiki dan mempersatukan *leerplan* (kurikulum)

sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh. Tetapi ternyata dalam praktek, sejak tahun 1940 mulai kelihatan secara samar-samar bahwa PUSA telah mengarah ke politik. Benih-benih permusuhan terhadap penjajah sungguh-sungguh ditanamkan, terutama kepada pemuda melalui organisasi kepanduannya, *Kasyafatul Islam (KI)* dan Pemuda PUSA, sehingga pada gilirannya gerakan ini telah menjadikan dirinya sebagai wujud gerakan anti penjajah yang cukup membahayakan di Aceh.

D. Penutup

Dengan diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok baru atau golongan intelektual dalam masyarakat Aceh. Mereka ini adalah putera-putera bangsawan (*uleebalang*) yang merupakan salah satu pendukung utama terbentuknya organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Aceh. Selain itu, faktor lain yang mendorong berdirinya madrasah-madrasah diseluruh tanah Aceh adalah surat kabar *Ummul Kura* yang dikirim oleh Teungku Syekh Abdulhamid Samalanga dari Mekkah. Didalam Surat kabar tersebut terdapat pesan-pesan yang penting yaitu masalah pembaharuan pendidikan Islam untuk mendapat kemerdekaan dan lainnya. Saran dan pesannya tersebut mendapat sambutan dari para ulama Aceh., dan akhirnya para ulama Aceh bergerak dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh memperbaharui Pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam, dengan merubah sistem pendidikan Dayah menjadi Madrasah yang berkelas, berbangku, berpapan tulis, dengan kurikulum yang modern, seperti yang

telah diatur di Mesir dan negeri-negeri Islam lainnya. Sehingga kaum bangsawan dan kaum ulama bersama-sama memelopori munculnya kesadaran nasional di daerah Aceh. Mereka saling menjalin kerjasama dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh.

Pendirian lembaga madrasah pertama kali di Aceh dimulai pada tahun 1916, diberi nama Madrasah Al Khairiyah yang berlokasi di Kutaraja yang kemudian disusul berdirinya beberapa madrasah lain. Selanjutnya pada tahun 1930-an, lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, antara lain berdirinya "*Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Idi*", yang didirikan oleh Syed Husein pada tahun 1928 di Idi; "*Madrasah Al-Muslim Peusangan*", yang didirikan oleh Tgk. Abd al- Rahman pada tahun 1930; dan "*Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*", yang diprakarsai oleh Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap dan Tgk. Ismail Yakub tahun 1939. Sehingga periode ini dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah agama di Aceh.

Puncak dari gerakan pembaharuan ini adalah dengan didirikannya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Salah satu faktor yang menyebabkan berdirinya PUSA adalah ketidakmampuan ulama untuk bekerja sama, terutama dalam bidang pendidikan. Melalui organisasi ini, mereka ingin mengatur kembali dan menstandarisasi kurikulum seluruh madrasah yang telah dibangun di Aceh. Organisasi PUSA memandang bahwa ilmu agama dan umum keduanya sama-sama penting bagi kemajuan umat manusia. Kalau lembaga pendidikan dayah lemah dalam

pengetahuan umum dan sekolah-sekolah umum lemah dalam pengetahuan Agama, maka PUSA memandang perlu penggabungan (*konvergensi*) kurikulum dayah yang mementingkan pendidikan agama dengan kurikulum sekolah-sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum. Kurikulum dan silabus madrasah-madrasah yang ada di Aceh waktu itu ternyata tidak memiliki keseragaman. Hal ini menurut PUSA akan menyulitkan bagi pelajar-pelajar yang ingin pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya.

Sementara upaya penyeragaman kurikulum dan silabus madrasah yang ada di Aceh dimaksud terbentur pada tidak adanya tenaga-tenaga guru siap pakai. Maka didirikanlah *Normal Islam Institut* di Bireuen sebagai sekolah guru yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, singkatnya agar kurikulum madrasah dapat diseragamkan. Dengan demikian gerakan-gerakan yang timbul di daerah Aceh pada awal abad XX dapat dikatakan unik bila dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Karena munculnya gerakan Nasional di Aceh dalam bentuk lembaga pendidikan keagamaan khas Aceh yang tidak ada sebelumnya di daerah-daerah lain luar Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1983. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- A.Hasjmy, 1976. *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta:Mus Karya Offset.
- A. Hasjmy, 1978. *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. Jakarta:Bulan Bintang.
- _____, 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh:Koninklijk Instituut.
- Alfian, 1987. *Segi-segi Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES.
- Depdikbud, 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta.
- _____, 1989. *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial*. Jakarta.
- Hasbi Amiruddin, 2003. *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Nazaruddin Sjamsuddin, 1999. *Revolusi di Serambi Mekkah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sufi, Rusdi, 1998. *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*.Banda Aceh: BKSNT.
- _____, 2009. *Pernak-pernik Sejarah Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.
- Sufi, Rusdi & Agus Budi Wibowo. 2007. *Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Di Aceh Awal Abad 20*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- _____. 2009. *Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Di Aceh Awal Abad XX*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.